



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## DAMPAK KONFLIK IRAN-ISRAEL TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI

**Aditya Eka Pranandiansyah**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[aditya.pranandiansya@dpr.go.id](mailto:aditya.pranandiansya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Konflik antara Iran dan Israel yang berlangsung selama 12 hari mulai mereda setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melakukan intervensi diplomatik yang mendorong tercapainya gencatan senjata. Meskipun eskalasi militer telah berkurang, dampak dari konflik tersebut masih dirasakan secara nyata, baik di kawasan Timur Tengah maupun dalam dinamika geopolitik global. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigatif terhadap potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Selat tersebut merupakan jalur strategis utama dalam distribusi minyak mentah global, dan penutupannya diperkirakan akan memicu fluktuasi harga energi yang signifikan. Kenaikan harga minyak dunia secara langsung dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, khususnya sektor industri manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan energi.

Kondisi geopolitik dan krisis global saat ini menyoroiti kerentanan rantai pasok global yang berdampak signifikan terhadap industri manufaktur di Indonesia. Jalur perdagangan maritim, khususnya di wilayah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama bagi sekitar 30 persen distribusi minyak dunia, berada dalam kondisi rawan dan berisiko terganggu. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai sektor manufaktur nasional. Misalnya, industri tekstil dan alas kaki diprediksi mengalami penurunan margin keuntungan antara 5 hingga 7 persen sebagai akibat dari meningkatnya biaya logistik. Sementara itu, sektor otomotif dan elektronik yang sekitar 65 persen produksinya bergantung pada komponen impor, menghadapi kendala pasokan semikonduktor dengan waktu tunggu mencapai 26 minggu. Sektor nikel dan baja menghadapi kenaikan biaya pengangkutan batubara sebesar 15 hingga 20 persen serta penundaan pengiriman hingga empat minggu, dengan potensi kerugian ekspor mencapai US\$1,2 miliar. Dalam sektor pupuk, Indonesia mengandalkan impor bahan baku berbasis NPK (Natrium, Fosfor, Kalium), seperti fosfat, di mana sekitar 64 persen pasokannya berasal dari Mesir yang terletak di kawasan strategis Timur Tengah. Adapun sektor industri kaca, gelas, dan keramik turut menghadapi peningkatan biaya produksi sebagai dampak dari penggunaan gas alam sebagai sumber energi utama.

Dalam pernyataannya sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan urgensi mitigasi risiko terhadap dampak konflik antara Iran dan Israel terhadap sektor industri nasional. Beliau menekankan bahwa ketergantungan industri dalam negeri terhadap energi impor, baik sebagai bahan baku maupun komponen input produksi, merupakan aspek krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Langkah mitigatif juga dianggap penting untuk mengantisipasi potensi gangguan pada rantai pasok global, terutama yang berkaitan dengan pasokan bahan baku industri, mengingat jalur logistik serta arus ekspor Indonesia melalui kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah dilanda konflik bersenjata.

Selain itu, Menteri Perindustrian turut menyoroti perlunya antisipasi terhadap gejolak nilai tukar mata uang yang dapat timbul akibat eskalasi konflik, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi harga input produksi dan menurunkan daya saing ekspor nasional. Sebagai bagian dari strategi stabilisasi, beliau juga mengimbau pelaku industri untuk memanfaatkan fasilitas *Local Currency Settlement* (LCS) yang disediakan oleh Bank Indonesia guna meredam dampak inflasi terhadap biaya produksi.

## Atensi DPR

Dalam menghadapi potensi dampak negatif dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel, pemerintah dipandang perlu segera melakukan pembenahan strategis terhadap sektor industri nasional. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan *crude palm oil* (CPO) sebagai alternatif untuk merespons lonjakan harga minyak global, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR RI melalui Komisi VII diharapkan mendorong Kementerian Perindustrian untuk menyusun peta jalan pengembangan industri petrokimia guna mempercepat realisasi proyek *bio-refinery* sebagai upaya menekan beban akibat kenaikan harga minyak dunia. Di samping itu, Komisi VII DPR RI juga dinilai perlu mendorong sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka menjaga keberlangsungan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar tetap terlindungi dari dampak konflik Iran-Israel, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap perlindungan industri domestik.

## Sumber

cnnindonesia.com, 25 Juni 2025;  
kompas.id, 19 April 2025;  
metrotvnews.com, 25 Juni 2025;  
money.kompas.com, 25 Juni 2025; dan  
nasional.kontan.co.id, 24 Juni 2025.

Minggu ke-4 Juni  
(23 s.d. 29 Juni 2025)

2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amardiyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*